**PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK SAPI MENURUT HUKUM**

**EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Senali Kecamatan**

**Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH **:**

**HERNI YANTI**

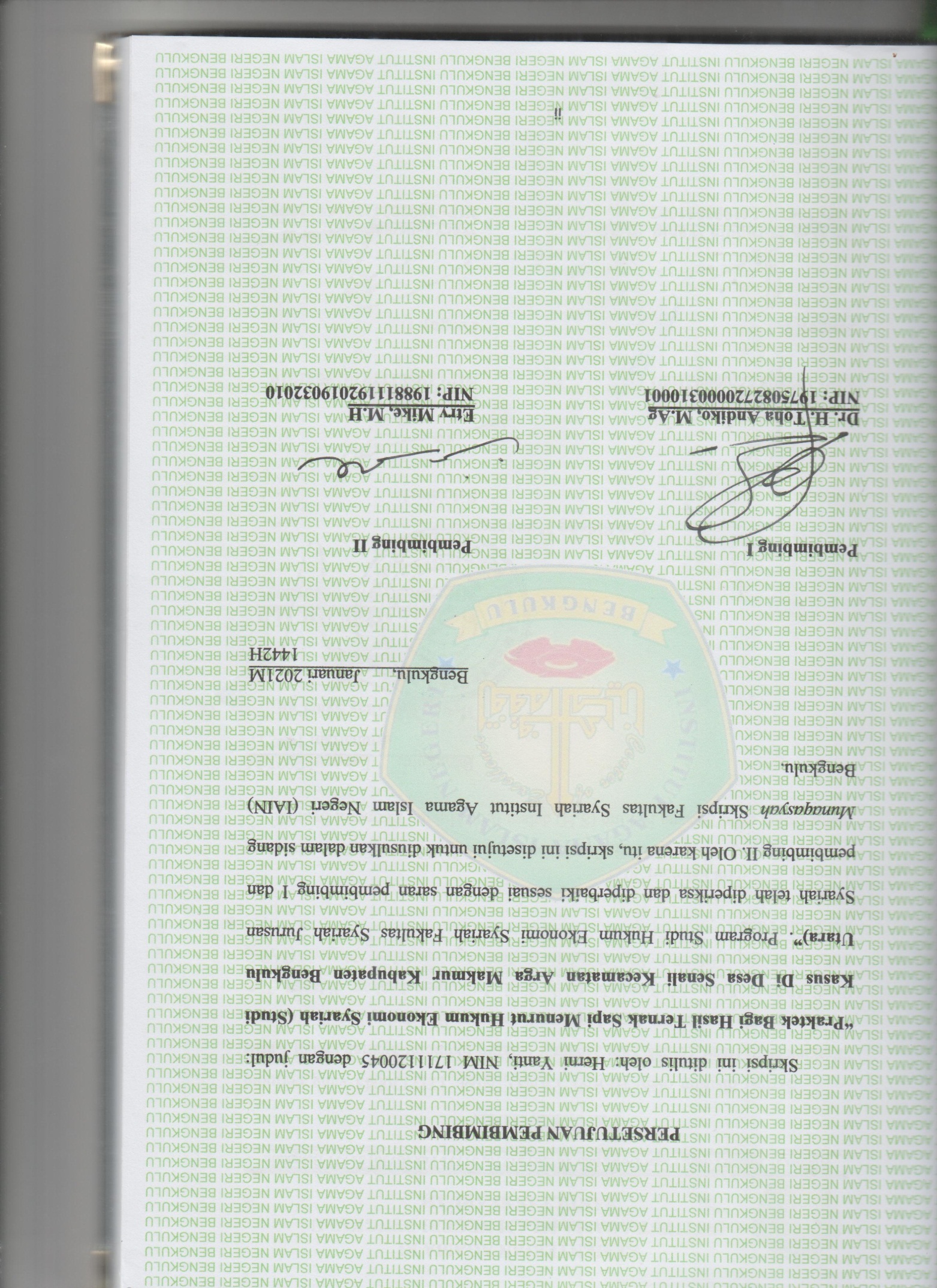
**NIM: 1711120045**

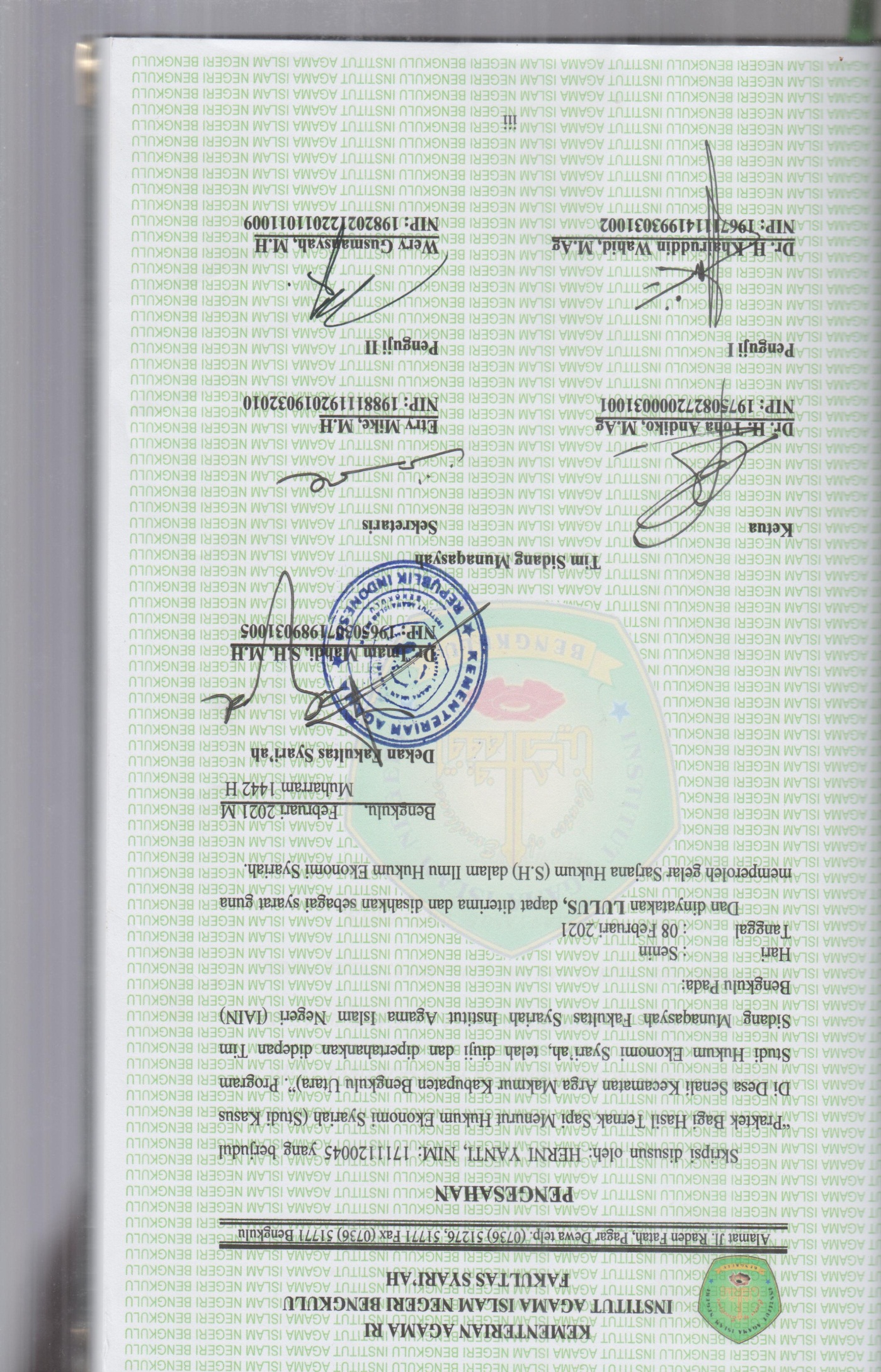
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2021 M/ 1442 H**





MOTTO

*Nilai akhir dari proses pendidikan yang sejatinya yaitu terekapitulasi dari keberhasilannya yang menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.*

*“Herni Yanti”*

**PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan Ridho-Mu Ya Allah, sujud syukur kepada-Mu Ya Allah Yang Maha Agung nan Maha Adil, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menempuh pendidikan yang aku jalani ini. Semoga keberhasilan menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Dengan rahmat Allah SWT pula yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan tepat pada waktunya, sehingga penulis pun tidak dapat berkata banyak lagi. Hanya lantunan Al-Fatihah beriringan shalawat dalam hatiku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku pada Mu Ya Allah SWT.

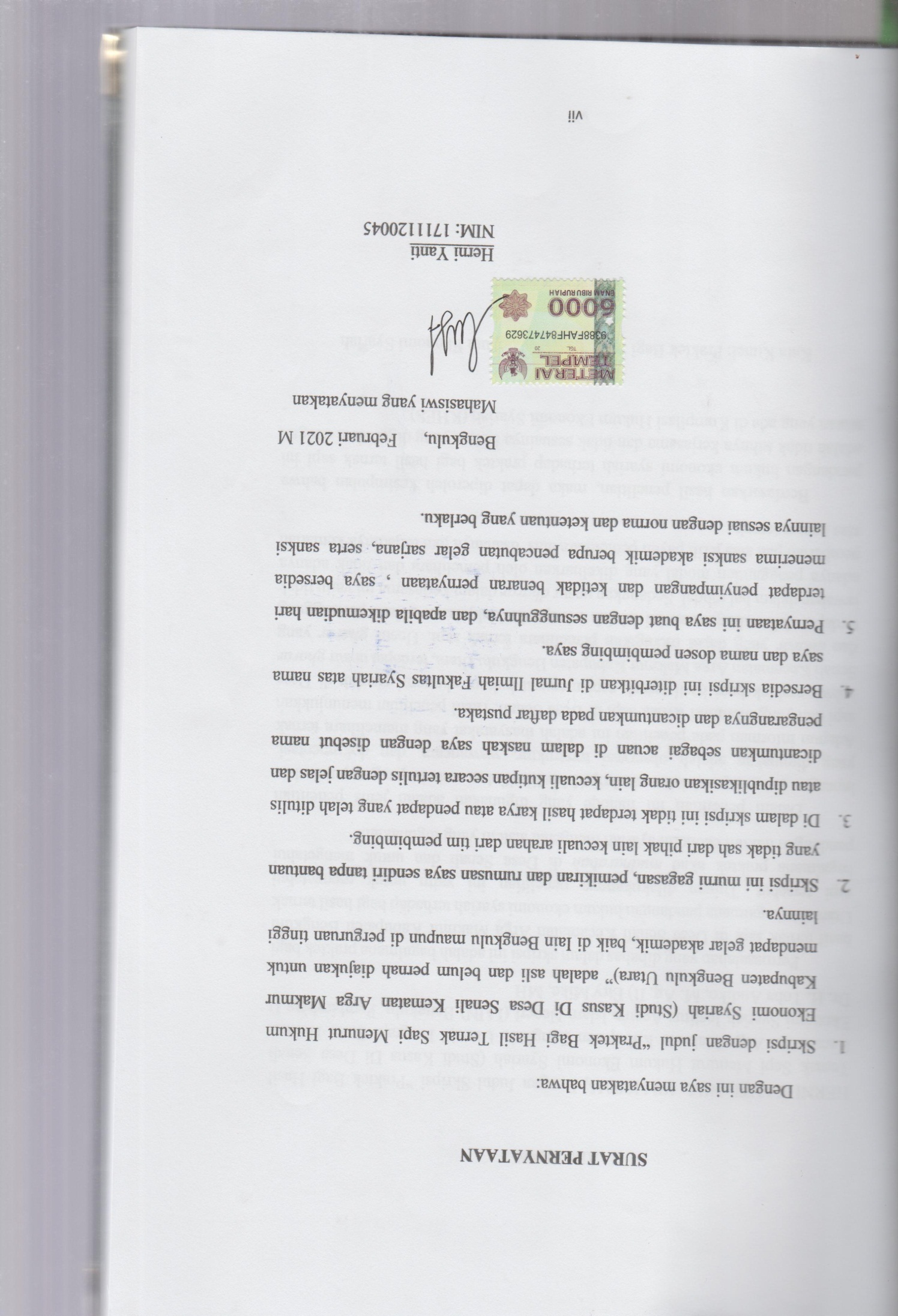
Ku persembahkan Karya sederhana ku ini untuk:

1. Terkhusus Ayah ku (Herwan) dan Ibu ku (Haryana) tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih takkan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan ayah-ibu, oleh karena itu terimalah persembahan bukti cinta ku ini. Maaf ayah-ibu jika sampai saat ini Herni baru bisa memberikan ini untuk ayah-ibu, terimakasih limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak kan terbalas sampai kapanpun sehingga herni bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayuk ku (Reka Desi Lestari) dan Adik ku (Riky Ardiansyah), terimakasih banyak karena telah mendukung ku dalam kelancaran skripsi ini dan menemani ku dalam keseharian selama menempuh kuliah.
3. Bapak dosen pembimbing I (Dr. H. Toha Andiko, M.Ag) dan pembimbing II (Etry Mike, MH) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya, semua tiada ternilai harganya, dan saya tidak bisa membalas semuanya selain rasa syukur terimakasih banyak, terimakasih atas jasa bapak dan ibu. Jasa mu akan selalu dikenang.
4. Bapak dosen Pembimbing Akademik (Wahyu Abdul Jafar, M.HI) yang selama ini senantiasa memberi kemudahan dan nasehat terbaiknya, saya ucapkan beribu terimakasih.
5. Semua keluarga (Nenek Nauya), (Nenek Kamar), (Datuk Ali), (Datuk Alwi), (Paman Kasbi), (Paman Ilul), (Paman Anton), (Bibik Romi), (Bibik Lela Asmara), (Bibik Lela Hartati), (Udo Andri), (Abang Fero), (Adek Deah), (Adek Ira), (Adek Laras), (Adek Lovi), (Adek Selfi), (Kak Ojhi), (Kak Roskan), dan yang lain yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas suport kalian semuanya.
6. Keponakan-keponakan ku (Syifa), (Haikal), (Salsa), dan (Khanza), terimakasih kalian selalu mewarnai hari-hari ku.
7. Sahabat-sahabat ku (Heni Helvia), (Sindy Ambar), (Qotrin Nada).
8. Segenap guru dan dosen yang telah mendidik dan mencurahkan mutiara ilmu kepada ku sejak SD sehingga selesainya studi ku di perguruan tinggi.
9. Agama, Bangsa, dan Negara ku.
10. Almamater ku tercinta (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu).

Hanya sebuah karya kecil ini dan sedikit untaian kata-kata yang dapat kupersembahkan kepada semua, maaf beribu maaf jika masih ada yang belum tertulis dalam karya sederhana ini namun beribu terimakasih pula ku ucapkan untuk semua yang sudah mendoakan. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, ku rendahkan hati serta diri meminta beribu-ribu maaf tercurah.

Semoga skripsi ini nantinya bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa menjadi amal jariyah dikemudian hari nanti.

***Aamiin Allah Humma Amiiin.***

******

**ABSTRAK**

HERNI YANTI, NIM: 1711120045, Dengan Judul Skripsi “Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pembimbing I) Dr. H. Toha Andiko, M. Ag, II) Etry Mike, MH

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil ternak sapi tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek akad *mudharabah* di Desa Senali dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem yang digunakan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terstruktur, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini adalah masyarakat yang memelihara ternak sapi dan yang memiliki ternak sapi di Desa Senali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek bagi hasil ternak sapi menurut hukum ekonomi syariah di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat unsur *gharar* dan *dharar* yang dapat merugikan pemelihara ternak sapi. Unsur *gharar* yang terdapat dalam kerjasama ini adalah adanya ketidakjelasan dalam pertanggung jawaban dalam hal modal. Sedangkan unsur *dharar* dalam kerjasama ini yaitu tidak adanya penggantian modal yang dikeluarkan oleh pemelihara dan tidak adanya pemberian pah atas jerih payah pemelihara atas usahanya jika terjadinya kematian atas hewan ternak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek bagi hasil ternak sapi ini adalah tidak sahnya kerjasama dan tidak sesuainya sistem yang digunakan dengan aturan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kata Kunci: Praktek Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Isalam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta memberikan arahan-arahan selama masa perkuliahan saya.
5. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.
6. Etry Mike, M.H selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.
7. Selaku penguji I skripsi saya dan telah memberikan arahan-arahan untuk perbaikan skripsi saya dengan tulus dan penuh kesabaran.
8. Selaku penguji II skripsi saya dan telah memberikan arahan-arahan untuk perbaikan skripsi saya dengan tulus dan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan setulus hati dalam hal administrasi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2021 M

1442 H

Penulis

Herni Yanti

NIM: 1711120045

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**

**PENGESAHAN iii**

**MOTTO iv**

**PERSEMBAHAN v**

**SURAT PERNYATAAN vii**

**ABSTRAK viii**

**KATA PENGANTAR ix**

**DAFTAR ISI xi**

**DAFTAR TABEL xiii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Batasan Masalah 8
4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9
5. Kegunaan Penelitian 9
6. Penelitian Terdahulu 10
7. Metode Penelitian 13
8. Sistematika Penulisan 20

**BAB II LANDASAN TEORI**

1. Bagi Hasil 22
2. Mudharabah 23
3. Hukum Ekonomi Syariah 28
4. Gharar 32
5. Dharar 34

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

1. Letak Dan Luas Wilayah 37
2. Keadaan Alam 38
3. Jumlah Penduduk 39
4. Kondisi Ekonomi 40
5. Pendidikan 42
6. Data Pemilik Dan Pemelihara Yang Bagi Hasil 44

**BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Dan Pemeliharaan Sapi Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara 46
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dan Pemeliharaan Sapi Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara 58

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 62
2. Saran 63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Pemilik dan Identitas 15

Tabel 1.2 Data Pemelihara dan Identitas 16

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 40

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 41

Tabel 1.5 Penduduk Desa Dilihat Dari Jenis Pendidikan 43

Tabel 1.6 Data Pemelihara Dan Pemilik Sapi 44

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Islam bersifat komprensif artinya mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sedangkan Islam bersifat universal maksudnya syariah Islam itu dapat diterapkankan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti.[[1]](#footnote-1)

Fiqh muamalah merupakan salah satu unsur penerapan sehingga biasa diaplikasikan dalam segala kedudukan dan kondisi kehidupan manusia. Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilakukan dalam kehidupan adalah sistem bagi hasil (kerjasama diantara dua belah pihak yaitu pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasil dari kerjasama itu dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak).Pada bagi hasil terdapat ketetapan dalam akad atau perjanjian, ketetapan yang dimaksud adalah penetapan pembagian hasil atau keuntungan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.[[2]](#footnote-2)

Sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

Artinya:

*Apabila telah ditu naikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Qs.Al-Jumu'ah:10)[[3]](#footnote-3)*

Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

Artinya:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (Qs.Al-Baqarah:198)[[4]](#footnote-4)*

Adapun hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ البَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ القَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ البَيْعُ إِلَي أَجَلٍ وَالمُقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasuulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberri tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."[[5]](#footnote-5)*

*Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama dalam usaha antara kedua belah pihak dimana pihak lainnya menjadi pengelola usaha. Keuntungan usaha secara *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak usaha yang dilakukan, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama atau juga disebut pemilik modal, dalam kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian dari pihak kedua atau pengelola usaha.[[6]](#footnote-6)

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan invertensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*.

Dalam *mudharabah*, pihak yang bekerja sama dengan modal yang diperoleh melalui perjanjian, *mudharabah* tidak dapat secara sah dibebankan dengan tanggungjawab karena adanya kerugian. Pada ketetapannya bahwa dalam *mudharabah* pihak yang bekerja tidak menanamkan modalnya dalam usaha, maka tidak bertanggung jawab atas adanya kerugian, dan kontrak yang dibuat antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut harus membagi keuntungan. Berdasarkan ketetapan dan perjanjian sebelumnya, pihak yang menjalankan usaha tidak harus bertanggung jawab atas kerugian.[[7]](#footnote-7)

Dalam kerjasama, yang menjadi unsur utamanya adalah akad, jika akad yang ditetapkan pada saat perjanjian tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad yang dilakukan itu batal. Adapun syarat dan rukun akad *mudharabah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

1. Syarat kerjasama dalam *mudharabah* diatur dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dalam akad.
2. Rukun kerjasama dalam *mudharabah* diatur dalam pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi:(1) *Shahib al-mal*/pemilik modal. (2) *Mudharib*/pelaku usaha; dan. (3) Akad.[[8]](#footnote-8)

Dalam kerjasama ini modal ditanggung seluruhnya oleh *shahib al-mal* (pemberi modal) dan pemelihara hanya mengelola modal yang diberikan oleh pemodal. Seperti yang telah diatur dala Pasal 247 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal.[[9]](#footnote-9)*Jadi menurut penulis bahwa semua modal dan biaya yang bersangkutan dengan pemeliharaan ternak sapi itu ditanggung oleh pemilik modal.

Kerja sama antara pemilik ternak sapi dan pemelihara ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah yang memiliki dua jenis sistem bagi hasil, dalam kerjasama ini yang dibahas adalah kerjasama dalam dua kategori yaitu dalam kategori pengembangbiakan dan . Sistem bagi hasil yang pertama yaitu pada kategori pengembangbiakan dan penggemukan. jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak sapi yang dipelihara oleh pihak pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak pemelihara itu melahirkan dua ekor anak sapi, maka dari anak sapi itu dibagi dua, satu untuk pemilik ternak sapi dan satu untuk pemelihara ternak sapi.

Sedangkan sistem bagi hasil yang kedua yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua. Contohnya, ketika akad pemilik ternak sapi menentukan harga jual sapi yang akan dipelihara dan ketika sapi telah siap untuk dijual, maka pemelihara akan menjual sapi tersebut dengan memberitahu kepada pemilik bahwa pemelihara akan menjual sapi tersebut. Ketika telah terjual maka uang modal yang telah ditentukan diberikan terlebih dahulu dan sisa dari pengembalian modal dibagi dua, 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik ternak sapi.

Adapun modal yang disediakan oleh pemilik sapi yaitu hanya berupa hewan ternak sapi itu saja dan jenis kelamin yang sesuai dengan apa yang ingin dipelihara oleh pemelihara sapi tersebut.[[10]](#footnote-10)

Dari observasi awal, penulis menduga bahwa dalam akad kerjasama antara pemilik ternak sapi dan pemelihara ternak sapi itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah akad *mudharabah*, rukun *mudharabah* dan tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Padahal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *mudharabah* mengharuskan pemilik modal menanggung seluruh biaya pemeliharaan sapi tersebut sampai beranak atau sampai layak jual, disamping itu resiko kematian sapi juga tidak ditentukan dalam perjanjian. Oleh sebab itu, penulis menduga bahwa praktek bagi hasil tenak sapi di Desa Senali tersebut mengandung unsur *gharar* dan *dharar.*

Adapun syarat akad *mudharabah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah diatur dalam Pasal 231 yang berbunyi: (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sedangkan rukun *mudharabah* dalam kerja sama ini yaitu: (1) *Shahib al-mal*/pemilik modal. (2) *Mudharib*/pelaku usaha; dan. (3) Akad. Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu: (1) Pasal 233 berbunyi "Kesepakatan bidang usaha yangakan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu". (2) Pasal 236 berbunyi "Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti". (3) Pasal 237 berbunyi "Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal". (4) Pasal 247 berbunyi "Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal".* (5) Pasal 252 berbunyi "Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.[[11]](#footnote-11)

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul "Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)"

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktekbagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara?
3. **Batasan Masalah**
4. Penulis hanya mengkaji akad *mudharabah* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
5. Penulis hanya mengkaji akad *mudharabah* pada ternak sapi.
6. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akad *mudharabah* bagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *mudharabah* akad bagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
3. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapakan dapat menjadi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dikalangan akademis khususnya dibidang praktek akad *mudharabah*, agar praktek *mudharabah* dikalangan masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, semoga melalui penelitian ini dapat dijadikan informasi dan memberikan wawasan yang lebih luas lagi pada kalangan masyarakat serta khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Praktek Akad *Mudharabah* Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Ekonomi Syariah.

1. **Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil dari penelitian yang akan penulis lakukan, maka peneliti perlu memberikan pemaparan terhadap beberapa karya ilmiah yang telah ada dan telah diteliti yang memiliki kemiripan objek pada penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan diteliti tentang *mudharabah* dibeberapa daerah.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nizwar Anas (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Mudharabah di BMT L-Risma Kota Bengkulu"*[[12]](#footnote-12)

Hasil dari penelitian di atas menyatakan bahwa praktek *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT L-Risma Kota Bengkulu sudah dapat dikatakan baik karena akad yang diterapkan benar-benar sudah terealisasi yaitu dibidang pembiayaan. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek mudharabah di BMT L-Risma Kota Bengkulu ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Islam yang dapat dilihat daripembagian keuntungan yang sudah ditetapkan diawal tanpa memperhatikan kemungkinan kerugian yang akan timbul dalam usaha *mudharib*.

Persamaan skripsi yang diteliti oleh Nizwar Anas dengan yang penulis teliti yaitu: keduanya membahas mengenai praktek *Mudharabah* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang pertama membahas tentang praktek *Mudharabah* di BMT, sedangkan yang penulis buat yaitu penulis lebih fokus membahas tentang praktek akad pada *mudharabah* mengenai ternak sapi.

1. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Yupita (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *"Praktek Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Pemerintah Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tungkal 2 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)"*[[13]](#footnote-13)

Hasil dari penelitian diatas menyatakan bahwa praktek bagi hasil pengelolaan sapi pemerintah perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Tungkal 2 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ini hanya akadnya saja yang telah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan dari segi pekerjaan dan pembagian hasilnya belum sesuai dengan Hukum Islam.

Persamaan skripsi yang diteliti oleh Yayuk Yupita dengan yang penulis teliti yaitu: keduanya membahas tentang bagi hasil atas pengelolaan ternak sapi. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi di atas membahas tentang praktek bagi hasil dalam pengelolaan sapi Pemerintah dalam presektif hukum Islam, sedangkan yang penulis buat yaitu penulis lebih berfokus pada akad dalam praktek *Mudharabah* dan pengelolaan sapi yang dipelihara bukan sapi milik Pemerintah dan penulis juga meneliti menurut Hukum Ekonomi Syariah.

1. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tresni Pertiwi (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)"*[[14]](#footnote-14)

Hasil dari penelitian di atas menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing terhadap pemelihara, menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil dalam hukum Islam.

Persamaan skripsi yang diteliti oleh Tresni Pertiwi dengan yang penulis teliti yaitu: keduanya membahas tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi di atas membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pada hewan kambing yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan yang penulis buat yaitu penulis lebih berfokus pada akad dalam praktek *Mudharabah* dan pengelolaan sapi yang dipelihara bukan sapi milik Pemerintah dan penulis juga meneliti menurut Hukum Ekonomi Syariah.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah *field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian secara mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah sebuah metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai peristiwa yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara jelas dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif antara lain:[[15]](#footnote-15)

1. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
2. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

1. **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memakan waktu selama enam bulan, dimulai sejak semester enam hingga semester tujuh. Periode itu dimulai dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai dilakukannya penelitian tentang ini.Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun yang menjadi alasan penulis mengangkat lokasi penelitian di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena banyak timbulnya masalah akibat terjadinya kerugian dan penggunaan metode bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Senali ini. Sistem yang digunakan oleh masyarakat di Desa Senali nampaknya bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itulah mengapa penulis memilih daerah ini untuk dijadikan lokasi atau tempat penelitian.

1. **Subjek/Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.[[16]](#footnote-16)

Untuk menetapkan informan, peneliti memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 7 orang pemilik sapi dan 7 orang pemelihara sapi. Untuk lebih jelasnya berikut data-data dan identitas pemilik ternak sapi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Data pemilik dan Identitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pemilik** | **Umur** | **Pendidikan** | **Pekerjaan** |
| 1 | Rasul | 75 Tahun | Tamat SMP/Sederajat | Wiraswasta |
| 2 | Koyot | 44 Tahun | Tamat SD/Sederajat | Wiraswasta |
| 3 | Guswanperi | 39 Tahun | Tamat SMP/Sederajat | Wiraswasta |
| 4 | Abu | 55 Tahun | Tamat SD/Sederajat | Pekebun karet |
| 5 | Jhon | 40 Tahun | Tamat SMA/Sederajat | Wiraswasta |
| 6 | Bahadi | 57 Tahun | Tamat SD/Sederajat | Pekebun sawit |
| 7 | Donal | 24 Tahun | Tamat SD/Sederajat | Pekebun karet |

Adapun data-data pemelihara ternak sapi di Desa Senali ini berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya berikut data-data dan identitas pemilik ternak sapi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Data pemelihara dan Identitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Pemelihara | Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
| 1 | Swin | 50 | Tidak pernah sekolah | Pekebun karet |
| 2 | Sugiantono | 34 | Tamat SD/Sederajat | Pekebun karet |
| 3 | Ramin | 40 | Tamat SD/Sederajat | Pekebun karet |
| 4 | Esi Sahidul | 42 | Tamat SD/Sederajat | Pekebun karet/sawit |
| 5 | Kasbi | 38 | Pernah sekolah SD tapi tidak lulus | Pekebun karet/sawit |
| 6 | Sahrul | 65 | Tamat SMP/Sederajat | Pekebun sawit |
| 7 | Icam | 37 | Tamat SD/Sederajat | Pekebun sawit |

Adapun alasan mengapa penulis memilih 14 orang di atas menjadi informan karena mereka penduduk asli di Desa Senali dan mereka juga sudah sangat berpengalaman dalam hal kerjasama bagi hasil dengan sistem yang ada di Desa Senali ini. Mereka juga sudah ada yang mengalami masalah kerugian dalam kerjasama ini.

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data itu diperoleh.[[17]](#footnote-17) Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data perimer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang akan diwawancarai adalah pemilik ternak sapi dan pemelihara ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

1. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dokumen-dokumen, buku-buku, internet, dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang valid antara teori dengan praktek yang ada dilapangan.

1. **Wawancara**

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)[[18]](#footnote-18). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini yaitu Pemilik ternak sapi dan Pemelihara ternak sapi.

1. **Dokumentasi**

Untuk metode ini sumber data berupa data tertulis seperti dokumen-dokumen yang ada dan berhubungan dengan objek dari penelitian yang dilakukan. Contohnya seperti gambaran dan arsip-arsip yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.[[19]](#footnote-19)

1. **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian obyek yang diteliti, atau cara penanganan pada suatu obyek tertentu dengan cara memilah-milah antara definisi yang satu dengan definisi-definisi yang lainnya untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.[[20]](#footnote-20)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertuang atau lisan dari masyarakat atau perilaku yang diamati dan dikelompokkan menurut kategori untuk menghasilkan kesimpulan.[[21]](#footnote-21)

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melaksanakan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.[[22]](#footnote-22) Analisis dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan secara umum dalam setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama dari skripsi ini berisi tentang latar belakng, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan dan sistematika penulisan.

**BAB II: KAJIAN TEORI**

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian akad, *mudharabah*, hukum ekonomi syariah, *gharar,* dan *dharar*.

**BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah lokasi penelitian, lokasi penelitian, dan letak geografis Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat dalam skripsi ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang membahas tentang praktek akad *mudharabah* bagi hasil ternak sapi menurut hukum ekonomi syariah di Desa Senali Kacamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

**BAB V: PENUTUP**

Bab kelima dalam skripsi berisi tentang penutup sebagai hasil akhir dari penelitian dan merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Bagi Hasil**

Menurut bahasa asing (Inggris) bagi hasil sering juga disebut dengan istilah *profit sharing.* Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba. Adapun secara istilah *profit sharing* adalah perputaran dalam beberapa bagian laba pada para pegawai dari sebuah perusahaan. Hal tersebut bisa berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang berdasakan pada laba yang telah diperoleh dalam tahun sebelumnya atau bisa juga berbentuk pembayaran mingguan ataupun bulanan.[[23]](#footnote-23)

Bagi hasil adalah sebuah sistem pengolahan dana dalam bidang perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha diantara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola *(mudharib).* Pada proses penetapan fase bagi hasil sangat diperlukan kesepakatan dari kedua belah pihak, yang terpapar dalam nisbah bagi hasil.[[24]](#footnote-24)

Secara syariah, prinsip bagi hasil itu didasarkan pada kaidah *al-mudharabah.* Mudharabah adalah kerjasama antara seorang pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk menjalankan sebuah usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah.[[25]](#footnote-25)

Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah lain *mudharabah* yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menggunakan istilah *qiradh.* Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama.[[26]](#footnote-26)

*Mudharabah* juga merupakan sebuah perjanjian diantara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana seorang pemilik modal sanggup dan bersedia membiayai seluruhnya suatu usaha dan pengelola menyetujui untuk mengelola usaha tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[[27]](#footnote-27)

1. **Mudharabah**

*Mudharabah* merupakan suatu kontrak yang ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah kaum quraisyi banyak yang berkerja sebagai pedagang, baik dari kalangan orang tua, anak-anak, laki-laki, maupun wanita mereka mengeluarkan modal unttuk memulai usahanya dalam bidang perdagangan.

Asal dari kata *mudharabah* adalah *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Kata lain dari *mudharabah* yaitu *qiradh*. *Mudharabah* merupakan bahasa dari penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*. Sebagaimana firman Allah Swt:

Artinya:

*Hai orang orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Qs.Al-Maidah:1)*

*Al-qiradh, al-muqaradhah,* dan *al-mudharabah* merupakan satu makna, yaitu penyerahan harta atau modal terhadap seseorang untuk diperniagakan, sedangkan keuntungannya dibagikan diantara pemilik modal dan yang diberi modal.*Qiradh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata al-qardhu yang memiliki arti *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha atau pengelola agar menggolangkan harta yang diberikan oleh pemilik tersebut dan pengusaha atau pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qiradh* bisa diambil dari kata *muqaradah* yang berarti *al-musawah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*. Adapun istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Menurut mayoritas fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, akad *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui.[[28]](#footnote-28)
3. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya mejadi pengelola modal yang telah diberikan oleh *shahib al-mal*.[[29]](#footnote-29)

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pemilik modal dan pelaku usaha dalam menjalankan akad *mudharabah* seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

1. Syarat *mudharabah* terbagi menjadi tiga bagian, seperti yang telah diatur dalam pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:
2. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
3. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang di sepakati.
4. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
5. Rukun *mudharabah* terbagi menjadi tiga bagian, seperti yang telah diatur dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi:
6. *Shahib al-mal*/ pemilik modal;
7. *Mudharib*/ pelaku usaha; dan
8. *Akad.[[30]](#footnote-30)*

Ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah* itu sangatlah banyak, salah satu sumber dimana kita dapat mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah* yaitu telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dibagi menjadi beberapa pasal yaitu:

1. Terdapat pada pasal 235 yang berbunyi: “(1) Modal harus berupa barang, uang dan/ atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *mudharib.* (3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.”
2. Terdapat pada pasal 236 yang berbunyi: “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib* *al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.”
3. Terdapat pada pasal 237 yang berbunyi: “Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.”
4. Terdapat pada pasal 242 yang berbunyi: “(1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.”
5. Terdapat pada pasal 247 yang berbunyi: “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.”
6. Terdapat pada pasal 250 yang berbunyi: “Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.”
7. Terdapat pada pasal 252 yang berbunyi: “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama-*mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib,* dibebankan pada pemilik modal.”
8. Terdapat pada pasal 254 yang berbunyi: “(1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia. (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib,* dibebankan pada pemilik modal.”[[31]](#footnote-31)
9. **Hukum Ekonomi Syariah**

Saat ini masih banyak diperdebatkan apa pengertian dari ekonomi Islam dan bagaimana ekonomi Islam, sehingga dengan banyaknya pendapat maka ada yang membagi ekonomi Islam menjadi tiga mazhab yaitu: mazhab *Baqiral-sadr,* mazhab mainsteam, dan mazhab alternatif-kritis. Namun, pengembangan dari ketiga mazhab ini belum begitu gencar dan masih dalam tatanan konsep dasar, kecuali mazhab mainstream. Zainuddin Ali menyatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang disandarkan pada Al-quran dan hadis untuk mengatur perekonomian di tengah masyarakat. Sedangkan menurut Mardani, ekonomi Islam ialah suatu usaha dalam ekonomi yang dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun badan usaha yang berbentuk hukum maupun non-hukum, yang memiliki tujuan komersial dan non-komersial yang diterapkan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam.[[32]](#footnote-32)

Terkait dengan definisi ekonomi syariah, ada beberapa pakar ekonomi syariah yang memberi pendapatnya yaitu: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang dibangun atas dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap masa.[[33]](#footnote-33)

Hakekat ekonomi syariah merupakan suatu bentuk pengaplikasian ajaran syariat Islam dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis problematika aktivitas ekonomi yang ada di tengah masyarakat.[[34]](#footnote-34)

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Shomad yaitu:

* 1. Prinsip keadilan, prinsip ini mencakup dari semua aspek kehidupan dan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting.
  2. Prinsip Al-Ihsan, prinsip *Al-ihsan* yaitu berbuat suatu kebaikan atau pemberian manfaat untuk orang lain.
  3. Prinsip *Al-Mas’uliyah*, yaitu prinsip bertanggung jawab dalam segala aspek.
  4. Prinsip *Al-Kifayah*, yaitu prinsip kecukupan yang bertujuan untuk membasmi kefakiran.
  5. Prinsip *Wasathiyah/I’tidal,* yaitu prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas yang tertentu.
  6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sebuah sendi akhlak karimah.[[35]](#footnote-35)

Dalam pengambilan istinbath hukum ekonomi Islam, sumber-sumber hukum ekonomi Islam sangat penting bagi para ulama dalam melakukan *ijtihad*yang berguna untuk menentukan manhaj yang berbeda-beda. Meskipun perbedaan dalam setiap pemikiran itu ada di kalangan para ulama, namun asas yang digunakan dalam setiap penentuan hukum tersebut bersumber dari dua hal yaitu al-Qur'an dan hadis. Adapun sumber-sumber pada hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber yang pertama dan yang paling utama dalam ekonomi Islam, di dalamnya dapat ditemui hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan juga terhadap hukum-hukum dan undang-undang ekonomi dalam tujuan Islam, diantaranya yaitu hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang terdapat pada surat al-Baqarah [2] ayat 275.

1. Al-Sunnah al-Nabawiyah

Al-Sunah merupakan sumber kedua dalam ekonomi Islam.Di dalamnya dapat ditemui *khazanah* tentang aturan perekonomian Islam. Diantaranya seperti sebab hadis yang berisi memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta yang dimiliki, baik harta milik pribadi ataupun umum serta tidak boleh mengambil harta orang lain.[[36]](#footnote-36)

1. Ijma'

*Ijma'* merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil *nash* (Al-Qur'an dan Hadis). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadis yang dapat menjadi pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. *Ijma'* ialah kesepakatan para *Mujtahid* dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis(*'amaly*). Para ulama sepakat bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara'. Sementara itu, menurut Jumhur, *ijma'* yang dapat dijadikan argumentasi dalam penetapan hukum syara' ialah *ijma'* para ulama Jumhur.[[37]](#footnote-37)

1. Kitab-kitab Fikih Umum dan Khusus

Kitab-kitab fikih ini membahas tentang hubngan manusia dengan Allah Swt. (seperti ibadah) hubungan manusia dengan manusia (hubungan sosial), dan menjelaskan tentang muamalah, didalamnya terdapat juga penjelasan mengenai ekonomi yang dikenal dengan istilah Al-Muamalah Al-Amaliyah, yang isinya mengenai hasil dari *ijtihad* Ulama terutama dalam mengistinbathkan hukum-hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang shahih.

Selain sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, ada juga asas atau landasan hukum ekonomi Islam yang dapat digunakan oleh para Ulama dalam menjelaskan penetapan hukum yang dilaksanakan. Asas dalam hukum ekonomi Islam ini terbagi menjadi beberapa asas antara lain:

1. Asas pertukaran manfaat, melalui kerja sama dan saling memiliki
2. Asas pemerataan kesempatan adalah suka sama suka atau adanya kerelaan dan tidak adanya penipuan atau spekulasi
3. Asas kebaikan dan ketakwaan.

Adapun salah satu tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah menyeimbangkan antara kehidupan yang dijalani di dunia dan kehidupan akhirat.[[38]](#footnote-38)

1. **Gharar**

Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), atau dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Gharar adalah bentuk dari keraguan, tipuan, atau tindakan yang memiliki tujuan untuk merugikan orang lain.

Dalam istilah fiqh, *gharar* ialah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut mazhab syafi'i, *gharar* ialah segala sesuatu yang memiliki akibat yang tersembunyi dari pandangan, dan sesuatu yang akan mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau peristiwa yang buruk.

Saiful Azhar Rosly menyatakan, bahwa *gharar* yang diartikan dalam pembahasan sah atau tidak suatu kontrak itu mengarah pada resiko dan ketidakjelasan.[[39]](#footnote-39)

Sedangkan pendapat lain mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap.[[40]](#footnote-40)

Dalam islam, sebuah risiko dapat terjadi dalam sebuah sistem *profit-share* (bagi hasil) kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, tidak terdapat *fixed and certain return* sebagaimana dengan konsep bunga, tetapi dilakukan *loss and profit sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari dana yang ada. Meskipun nisbah bagi hasil disepakati sejak awal, perolehan real dari bagi hasil ini bisa diketahui setelah dana benar-benar menghasilkan.[[41]](#footnote-41)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan Rasulullah atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang pokok dan sangat penting dalam transaksi jual beli ataupun transaksi yang lainnya.[[42]](#footnote-42)

Adapun dasar dalam larangan melakukan *gharar* yaitu salah satu sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَي رَسُوْلَّ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اْلحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ اْلغَرَارِ (رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar”. (HR. Muslim, hadis no. 2783)*

Menurut Imam Nawawi bahwa sabda Rasulullah Saw. di atas adalah sebuah pokok bahasan pada bab jual beli dan mencakup banyak permasalahan yang sangat luas. Sabda Rasulullah Saw. ini juga menjadi dasar hukum dilarangnya *gharar* dalam berbagai akad transaksi.[[43]](#footnote-43)

1. **Dharar**

Kaidah *dharurah* didasarkan pada hadis Nabi SAW, yang diriwwayatkan oleh Ibnu Majah, Darul Qutni, Hakim dan lainnya yang berarti: "Jangan memudharatkan diri dan orang lain". Sedangkan menurut Ahmad bin Muhammad al-Zaqra hadis ini tidak hanya menjadi dasar kaidah, tetapi nama bagi kaidah *al-dharar* juga diambil dari hadis tersebut.[[44]](#footnote-44)

Kata *al-dharurat* yang diambil dari kata *dharar* berarti bahaya. *Dharurat* juga berarti *masyaqqah* atau kondisi sulit. Menurut Al-Zuhaily *dharurah* yaitu kondisi sulit yang menimpa seseorang dan kondisi itu diduga akan mengakibatkan bahaya pada seseorang atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau harta. Dengan kondisi sulit itu, maka seseorang diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang haram.

Maka dapat disimpulkan bahwa *dharurah* adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/kematian (*al-idhthirâr al-mulji’ alladzi yukhsya minhu al-halak*).[[45]](#footnote-45)

Kedharuratan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1. Darurat, adalah kondisi seseorang yang apabila tidak segera ditolong maka dikhawatirkan akan mati.
2. Hajat, adalah kondisi seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan maka dikhawatirkan akan mengakibatkan datangnya keburukan namun tidak sampai mati.
3. Manfaat, adalah suatu kepentingan sesorang untuk menciptakan kehidupan yang layak.
4. *Zienah*, adalah suatu kebutuhan seseorang seperti kebutuhan orang yang terpaksa mengkonsumsi dengan lauk yang seadanya, padahal ia mengharapkan lauk-pauk yang mewah.

Fudlul, adalah suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa mengkonsumsi makanan yang cukup dan layak, tetapi ia masih ingin lebih dari itu, sehingga dapat berakibat mengkonsumsi makanan yang haram dan syubhat.[[46]](#footnote-46)

**BAB III**

**PROFIL DESA SENALI KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA**

1. **Letak dan Luas Wilayah**

Desa Senali adalah salah satu diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Arga Makmur, letaknya lebih kurang 61 kilo meter dari Kota Bengkulu. Desa Senali merupakan salah satu diantara desa-desa yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang berada di Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun luas wilayah Desa Senali ini yaitu sebesar lebih kurang 3.200 Ha, yang tediri dari 200 Ha sebagai wilayah pemukiman penduduk dan 3000 Ha yang dijadikan menjadi wilayah perkebunan masyarakat. Berikut merupakan jarak dari Desa Senali menuju ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Jarak Desa Senali dengan Kecamatan Arga Makmur yaitu 7.3 Km.
2. Jarak Desa Senali dengan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 6.8 Km.
3. Jarak Desa Senali dengan Provinsi Bengkulu yaitu 61 Km.[[47]](#footnote-47)

Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki batas-batas wilayah, adapun batas-batas wilayah yang dimiliki tersebut yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Tembilang.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan masyarakat.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan masyarakat.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuro Tidur.[[48]](#footnote-48)
5. **Keadaan Alam**

Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Desa Senali ini merupakan dataran tinggi yang diapit oleh dua jalur sungai yang mengalir dari gunung langsung, tanpa melintasi desa yang lain. Desa Senali juga kesuburan tanah yang cukup bagus, pegunungan dan perkebunan juga masih sangat banyak. Perkebunan masyarakat yang paling dekat tempatnya yaitu di belakang rumah hunian masyarakat, namun masih banyak juga yang berkebun di daerah kaki bukit dan di bukit-bukit. Perkebunan yang berada di kaki bukit dan di bukit-bukit biasanya ditanami dengan kopi yang menjadi pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di Desa Senali.

Adapun musim hujan setiap tahunnya berkisar antara bulan September hingga bulan Oktober, musim tersebut terjadi setiap tahun. Suhu di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara cukup bervariasi, minimal 18 derajat celcius hingga suhu maksimum yang mencapai 36 derajat celcius. Sedangkan curah hujan berkisar pada angka 4.397 mm/tahun dan kelembapan udara berkisar pada angka 74-90%, sehingga cocok untuk tanaman karet, sawit dan tanaman lainnya.[[49]](#footnote-49)

1. **Jumlah Penduduk**

Penduduk di Desa Senali 80% merupakan penduduk asli dan 20 persen bukan penduduk asli, melainkan pendatang dari daerah lain. Berdasarkan keterangan dari kepala desa Desa Senali kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan data penduduk Desa Senali tahun 2020, penduduk Desa Senali Kecamatan Argamakmur ini secara keseluruhannya berjumlah 1.410 jiwa yang terdiri dari 737 Jiwa penduduk laki-laki dan 673 jiwa penduduk perempuan.

Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terbagi menjadi tiga (3) kadun, yang mana kadun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kadun 1 (Hilir)
2. Kadun 2 (Pertengahan Desa)
3. Kadun 3 (Hulu)

Adapun beberapa masalah yang penting juga untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu susunan penduduk menurut jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Dari beberapa masalah itu dapat diketahui jumlah penduduk yang sudah produktif dan penduduk yang belum produktif. Penyediaan lapangan pekerjaan, usia sekolah, jumlah penganut masing-masing agama, serta sarana untuk beribadah dan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.[[50]](#footnote-50)

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penduduk Desa Senali Dibedakan Menurut Jenis Kelamin**

**Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1 | 737 Orang | 673 Orang |
| Jumlah | | 1.410 Orang |

Sumber Data: Kantor Desa Senali, Oleh Ibu Deah, 27 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Menurut Eni “penduduk Desa Senali dapat dibedakan menjadi beberapa macam golongan yakni usia belum produktif, usia telah produktif, dan usia produktif penuh, jadi pada tahun 2020 usia belum produktif di Desa Senali sekitar 23%, usia produktif 49%, dan usia produktif penuh 27%. Dengan data-data ini dapat terlihat jelas dan dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang dihadapi dalam penyediaan tenaga kerja di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara cukup besar.[[51]](#footnote-51)

1. **Kondisi Ekonomi**

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur yakni sebagai pekebun, dan yang lainnya petani penggarap tanaman makanan, peternak, dan pedagang, sehingga mata pencaharian penduduk di desa ini dapat dikatakan 80% sebagai pekebun, dan sedikit sekali yang mata pencahariannya sebagai petani, pedagang, buruh, dan pegawai negeri. Walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang berprofesi sebagai pedagang, karyawan swasta, ataupun pegawai negeri, namun mereka masih memiliki kebun sawit atau karet. Untuk lebih jelasnya berikut klasifikasi mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**

**Jumlah Penduduk Desa Senali Menurut Jenis Pekerjaan**

**Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pekerjaan | Jumlah |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 11 |
| 2 | Petani | 93 |
| 3 | Buruh | 25 |
| 4 | Pedagang | 60 |
| 5 | Karyawan Swasta | 113 |
| 6 | Peternak | 25 |
| 7 | Pekebun | 588 |

Sumber Data: Kantor Desa Senali, Oleh Ibu Deah, 27 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan tabel di atas sudah jelas menyatakan bahwa mata pencaharian yang paling besar yaitu perkebunan, jika dibandingkan dengan mata pencaharian yang lainnya, seperti pedagang, buruh, dan pegawai negeri sipil. Buruh, peternak, dan pedagang untuk menambah penghasilan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Senali ini sangat bergantung pada hasil perkebunan mereka, karena masing-masing masyarakat memiliki lahan perkebunan.[[52]](#footnote-52)

Lahan yang digarap yang paling utama yaitu lahan untuk perkebunan, yang digarap dengan sistem pengolahan yang masih tradisional yaitu dengan menebang lahan, membakar lahan yang telah ditebang, merumput, mencangkul, meracun, dan lainnya untuk areal perkabunan seperti karet, sawit, dan kopi yang pada umumnya berada di kaki bukit.

1. **Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menciptakan manusia yang berkualitas, untuk itulah jajaran kepemerintahan di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur ikut serta mendorong dan memacu masyarakat untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, tetutama anak-anak. Hampir semua anak-anak di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur mengenyam pendidikan, namun tidak semua dapat menyelesaikan sekolahnya baik itu tingkat dasar, tingkat pertama, tingkat menengah, serta perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor, tapi faktor yang paling utama yaitu karena faktor ekonomi dan lingkungan.

Jika dilihat dari segi pendidikannya di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur sudah cukup memadai, karena di desa ini sudah terdapat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, namun khususnya dalam bidang keagamaan di desa ini masih sangat perlu dilengkapi untuk menunjang pendidikan pada masyarakat setempat agar dapat menjadi lebih maju lagi. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan, karena pendidikan merupakan tonggak dari kualitas manusia agar dapat membangun kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi pendidikan penduduk di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur dapat dilihat pada tabel berikut:[[53]](#footnote-53)

**Tabel 1.5**

**Penduduk Desa Senali Dilihat Menurut Jenis Pendidikan**

**Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 518 jiwa |
| 2 | Tamat SMP/Sederajat | 254 jiwa |
| 3 | Tamat SMA/Sederajat | 111 jiwa |
| 4 | Lulusan D1 | 8 jiwa |
| 5 | Lulusan S1 | 11 jiwa |

Sumber Data: Kantor Desa Senali, Oleh Ibu Deah, 27 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

Adapun dibidang pendidikan non formal, penduduk Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara juga mendapat pendidikan non formal yakni pendidikan luar sekolah berupa latihan beladiri, kursus, dan belajar mengaji yang diikuti masyarakat Desa Senali yang sebagian gurunya merupakan pemuda dan pemudi dari masyarakat di desa ini sendiri.

Masyarakat telah mengikuti pendidikan non-formal ini agar dapat mempersiapkan generasi muda yang siap hidup mandiri, sebab pendidikan ini juga penting bagi manusia dalam pembangunan bangsa dan negara agar lebih maju.[[54]](#footnote-54)

1. **Data Pemilik Dan Pemelihara Yang Bagi Hasil**

Dalam data pemilik dan pemelihara sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini, lebih dominan atau lebih banyak pemelihara dari pada pemilik ternak sapi. Agar lebih jelas mudah untuk diketahui mengenai pemilik dan pemelihara sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:[[55]](#footnote-55)

**Tabel 1.6**

**Data pemilik dan pemelihara sapi yang bagi hasil di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Pemelihara** | **Nama Pemilik** | **No** |
| Swin | Rasul | 1 |
| Sugiantono | Koyot | 2 |
| Ramin | Guswanperi | 3 |
| Esi Sahidul | Abu | 4 |
| Kasbi | Jhon | 5 |
| Sahrul | Bahadi | 6 |
| Icam | Donal | 7 |

Sumber Data: Kantor Desa Senali, Oleh Ibu Deah, 27 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara**

Pada dasarnya sistem kerja sama bagi hasil ini sudah sangat sering digunakan dalam pemeliharaan ternak sapi di Indonesia, dan salah satu desa yang melakukan kerja sama bagi hasil ini yaitu Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Walaupun bukan hanya di Desa Senali yang menggunakan sistem bagi hasil dan daerah-daerah lain juga banyak sekali yang menggunakan sistem ini, namun setiap daerah sedikit banyaknya pasti memiliki sistem yang berbeda bahkan ada juga yang satu daerah namum sistemnya tetap berbeda seperti yang ada di Desa Senali ini. Sebelum pemilik sapi dan pemelihara sapi melakukan kerja sama, mereka pasti mengadakan perjanjian terlebih dahulu yang berisi tentang kesepakatan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta bagaimana sistem pembagian hasil dan pemeliharaan ternak sapi yang akan dilakukan sesuai dengan yang biasa diterapkan jika melakukan kerja sama pemeliharaan sapi di Desa Senali:

1. Proses Perjanjian

Seperti yang telah dijelaskan oleh pak Kasbi yang sebagai pemelihara ternak sapi, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam proses perjanjian ada beberapa yang harus kami persiapkan dan wujudkan agar tejalinnya kerjasama pemeliharaan ternak sapi tersebut yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang inin dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan ternak sapi. Perjanjian yang kami lakukan tidak menggunakan surat atau perjanjian yang ditulis diatas kertas, namun hanya dilakukan secara lisan saja diantara kami.”[[56]](#footnote-56)

Sama halnya seperti yang diutarakan oleh pak Sahrul sebagai pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam proses perjanjian ada beberapa yang harus kami persiapkan dan wujudkan agar tejalinnya kerjasama pemeliharaan ternak sapi tersebut, yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang inin dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan ternak sapi. Perjanjian yang kami lakukan tidak menggunakan surat atau perjanjian yang ditulis diatas kertas, namun hanya dilakukan secara lisan saja diantara kami.”[[57]](#footnote-57)

Serupa juga seperti apa yang diutarakan oleh pak Sugiantono selaku pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam proses perjanjian ada beberapa yang harus kami persiapkan dan wujudkan agar tejalinnya kerjasama pemeliharaan ternak sapi tersebut, yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang inin dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan ternak sapi. Perjanjian yang kami lakukan tidak menggunakan surat atau perjanjian yang ditulis diatas kertas, namun hanya dilakukan secara lisan saja diantara kami.”[[58]](#footnote-58)

Selaras juga seperti yang diutarakan oleh pak Ramin sebagai pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam proses perjanjian yang dilakukan, kami membicarakan tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang inin dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama ternak sapi ini yang harus disepakati oleh kami. Dan perjanjian dalam perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan.”[[59]](#footnote-59)

Selaras juga seperti yang telah diutarakan oleh pak Jhon sebagai pemilik dari ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam proses perjanjian yang saya dan pemelihara lakukan adalah menentukan dan menyepakati tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang ini dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama, agar terjalin kerjasama yang baik. Dan perjanjian yang saya dan pemelihara lakukan ini hanya secara lisan, tidak menggunakan surat ataupun ditulis di atas kertas.”[[60]](#footnote-60)

Dengan adanya data-data yang telah diperoleh oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan pemelihara ternak sapi ini meliputi beberapa hal yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, dan sistem pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama pemeliharaan ternak sapi ini. Perjanjian yang digunakan oleh kedua pihak tidak menggunakan surat atau perjanjian yang ditulis di atas kertas, namun hanya dilakukan secara lisan saja diantara kedua belah pihak.

1. Modal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik dan pemelihara sapi, pak Kasbi sebagai pemelihara mengatakan bahwa:

“Dalam kerjasama yang kami lakukan ini, pemilik sapi hanya menyediakan hewan ternak sapinya saja, dengan harga sapi berkisar Rp7.000.000 sampai Rp12.000.000. Sedangkan untuk biaya atau modal dalam pembuatan kandang untuk satu ekor sapi itu mengeluarkan Rp1.000.000, penyuntikan sapi agar sapi hamil dalam satu kali suntikan sebesar Rp100.000, biaya penyabitan rumput untuk satu ekor sapi dalam satu hari membutuhkan 1 karung rumput yang harga satu karung rumput Rp50.000, dan biaya perjalanan dalam mengurus perkembang biakan. Semua itu ditanggung oleh saya sendiri.”[[61]](#footnote-61)

Sama halnya seperti yang diutarakan oleh pak Sahrul sebagai pemelihara ternak sapi yang berdasarkan wawancara yang telan penulis lakukan, pak Sahrul mengutarakan bahwa:

“Dalam kerjasama yang kami lakukan ini, pemilik sapi hanya menyediakan hewan ternak sapinya saja, dengan harga sapi berkisar Rp7.000.000 sampai Rp12.000.000. Sedangkan untuk biaya atau modal dalam pembuatan kandang untuk satu ekor sapi itu mengeluarkan Rp1.000.000, penyuntikan sapi agar sapi hamil dalam satu kali suntikan sebesar Rp100.000, biaya penyabitan rumput untuk satu ekor sapi dalam satu hari membutuhkan 1 karung rumput yang harga satu karung rumput Rp50.000, dan biaya perjalanan dalam mengurus perkembang biakan. Semua itu ditanggung oleh saya sendiri.Dalam kerjasama yang kami lakukan ini, pemilik sapi hanya.”[[62]](#footnote-62)

Serupa juga seperti apa yang diutarakan oleh pak Sugiantono selaku pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Pada kerjasama yang saya dan pemilik sapi lakukan ini bahwa pemilik modal hanya menyediakan hewan ternak sapi saja, adapun modal selain itu semuanya ditanggung oleh saya sendiri.”[[63]](#footnote-63)

Selaras juga seperti yang diutarakan oleh pak Ramin sebagai pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Modal yang pemilik sediakan pada kerjasama yang kami lakukan ini hanya menyediakan hewan ternak sapinya saja, adapun modal yang dikeluarkan selain hewan ternak sapi ini ditanggung oleh saya sendiri.”[[64]](#footnote-64)

Sama halnya dengan yang diutarakan oleh pak Jhon sebagai pemilik ternak sapi, ia mengatakan bahwa:

“Modal yang saya sediakan hanyalah hewan ternak sapinya saja”.[[65]](#footnote-65)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik dan pemelihara ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bahwa modal yang ditanggung oleh pemilik sapi hanya modal untuk pembelian hewan ternak sapinya saja. Sedangkan modal yang dikeluarkan selain dari pembelian hewan ternak sapi itu semua ditanggung oleh pemelihara sapi.

1. Proses Pemeliharaan dan Pengembangbiakan Ternak Sapi

Dalam proses pemeliharaan ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini menggunakan dua sistem pemeliharaan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Kasbi sebagai pemelihara ternak sapi, iamenjelaskan bahwa:

“Pada proses pemeliharaan yang saya lakukan yang paling utama adalah saya harus mengambil sapi yang akan saya pelihara kepada pemilik sapi sesuai dengan jenis kelamin sapi yang ingin saya pelihara dan yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah kami lakukan. Setelah itu barulah saya membuat kandang sapi karena saya ingin memelihara menggunakan kandang, membersihkan kandang, mempersiapkan perlengkapan seperti tempat minum untuk sapi, menyabit rumput untuk makan sapi dan memberikan makan pada sapi sebanyak tiga kali dalam sehari. Saya juga bertugas memnyuntikkan sapi dengan sperma yang telah saya beli agar sapi yang saya pelihara mengalami pengembangbiakan dan saya terus memberikan makan untuk sapinya sampai sapi yang saya pelihara melahirkan. Dan saya tidak pernah mengeluarkan sapi dari kandangnya karena makanan untuk sapi selalu saya sabit dan saya beri makan di kandangnya saja. Dalam pemeliharaan ini pemilik tidak ikut campur dalam memelihara ternak sapi.”[[66]](#footnote-66)

Sama halnya seperti yang diutarakan oleh pak Sahrul sebagai pemelihara ternak sapi yang berdasarkan wawancara yang telan penulis lakukan, pak Sahrul mengutarakan bahwa:

“Pada proses pemeliharaan yang saya lakukan yang paling utama adalah saya harus mengambil sapi yang akan saya pelihara kepada pemilik sapi sesuai dengan jenis kelamin sapi yang ingin saya pelihara dan yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah kami lakukan. Setelah itu barulah saya membuat kandang sapi karena saya ingin memelihara menggunakan kandang, membersihkan kandang, mempersiapkan perlengkapan seperti tempat minum untuk sapi, menyabit rumput untuk makan sapi dan memberikan makan pada sapi sebanyak tiga kali dalam sehari. Saya juga bertugas memnyuntikkan sapi dengan sperma yang telah saya beli agar sapi yang saya pelihara mengalami pengembangbiakan dan saya terus memberikan makan untuk sapinya sampai sapi yang saya pelihara melahirkan. Dan saya tidak pernah mengeluarkan sapi dari kandangnya karena makanan untuk sapi selalu saya sabit dan saya beri makan di kandangnya saja. Dalam pemeliharaan ini pemilik tidak ikut campur dalam memelihara ternak sapi.”[[67]](#footnote-67)

Serupa juga seperti apa yang diutarakan oleh pak Sugiantono selaku pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam kerjasama ini setelah melakukan perjanjian antara saya dan pemilik ternak sapi adalah mengambil sapi yang ada pada pemilik ternak sapi. Saya memelihara hanya memelihara sapi jantan. Jadi dalam proses pemeliharaan yang saya lakukan hanya memberi makan ternak sapi sebanyak tiga kali sehari. Saya tidak menggunakan kandang dalam pemeliharaan ini, tapi saya sapi yang saya pelihara saya tambang di kebun milik saya, setiap pagi, siang, dan sore saya menggiring sapi ketetempat yang banyak ditumbuhi rumput di kebun saya. Dan untuk mkan malam sapi saya sabit dan diletakkan ditempat saya mengikat sapi itu. Itulah yang saya lakukan setiap hari sampai sapi siap dijual. Pemilik sapi tidak ikut campur dalam pemeliharaan yang saya lakukan.”[[68]](#footnote-68)

Selaras juga seperti yang diutarakan oleh pak Ramin sebagai pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam proses pemeliharaan pada kerjasama ini saya memelihara sapi betina dan jantan. Setiap harinya saya menyabit rumput dan membawa ke kandang yang telah saya buat untuk memberi makan sapi sebanyak tiga kali sehari. Itu saya lakukan setiap hari saya lakukan hingga sapi berkembang biak. Dalam pemeliharaan ini pemilik tidak ikut campur dalam memelihara ternak sapi.”[[69]](#footnote-69)

Hal ini Selaras juga seperti yang telah diutarakan oleh pak Jhon sebagai pemilik dari ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam kerjasama bagi hasil pemeliharaan ternak sapi ini saya tidak ikut campur dalam pemeliharaan sapinya, pembuatan kandang, dan pengembangbiakan ternak sapi ini. Itu semua dilakukan oleh pemelihara sapinya. Saya hanya menyiapkan hewan ternak sapi saja.”[[70]](#footnote-70)

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis dari pemilik dan pemelihara ternak sapi yang ada di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini, bahwasanya proses pemeliharaan hanya dilakukan oleh pemelihara saja, mulai dari pembuatan kandang, penyediaan pakan untuk ternak sapi, pengembangbiakan ternak sapi, dan sampai ternak sapi siap untuk di jual bagi pemelihara yang hanya memelihara sapi jantan saja. Dan pemilik hanya menyediakan hewan ternak sapi saja.

Hal sama yang penulis peroleh dari pemilik ternak sapi yang lainnya yaitu pak Guswanperi, ia mengatakan bahwa:

“Saya hanya menyediakan hewan ternak sapi saja, saya tidak ikut campur dalam hal pemeliharaan sampai ternak sapi menghasilkan anak sapi ataupun sampai sapi siap dijual. Semuanya diurus oleh pemelihara sapi.”[[71]](#footnote-71)

Serupa juga dengan apa yang telah dijelaskan oleh pak Rasul sebagai pemilik ternak sapi, ia menjelaskan bahwa:

“Saya hanya menyediakan ternak sapi dan tidak membantu dalam pemeliharaan ternak sapi dan tidak ikut dalam pengembangbiakan”.[[72]](#footnote-72)

1. Batas Waktu Kerjasama

Pada pembahasan batas waktu dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Senali ini, hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan pemelihara dan pemilik ternak sapi di Desa Senali ini yaitu seperti yang telah diutarakan oleh pak Kasbi sebagai pemelihara hewan ternak sapi bahwa:

“Dalam perihal batasan waktu pelaksanaan kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi yang saya lakukan ini bahwa saya dan pemilik sapi telah sepakat bahwa batas waktunya tidak ditentukan sampai kapan saya boleh memelihara sapi ini, karena pemiliki menyerahkan batas waktunya kepada saya, batasnya sampai saya tidak ingin lagi melakukan kerjasama itu lagi.”[[73]](#footnote-73)

Sama halnya seperti yang diutarakan oleh pak Sahrul sebagai pemelihara ternak sapi yang berdasarkan wawancara yang telan penulis lakukan, pak Sahrul mengutarakan bahwa:

“Dalam perihal batasan waktu pelaksanaan kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi yang saya lakukan ini bahwa saya dan pemilik sapi telah sepakat bahwa batas waktunya tidak ditentukan sampai kapan saya boleh memelihara sapi ini, karena pemiliki menyerahkan batas waktunya kepada saya, batasnya sampai saya tidak ingin lagi melakukan kerjasama itu lagi.”[[74]](#footnote-74)

Serupa juga seperti apa yang diutarakan oleh pak Sugiantono selaku pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam perihal batasan waktu pelaksanaan kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi yang saya lakukan ini bahwa saya dan pemilik sapi telah sepakat bahwa batas waktunya tidak ditentukan sampai kapan saya boleh memelihara sapi ini, karena pemiliki menyerahkan batas waktunya kepada saya, batasnya sampai saya tidak ingin lagi melakukan kerjasama itu lagi.”[[75]](#footnote-75)

Selaras juga seperti yang diutarakan oleh pak Ramin sebagai pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Dalam kerjasama yang saya dan pemilik sapi lakukan ini bahwa batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang kami lakukan adalah sampai saya tidak ingin lagi melakukan kerjasama pemeliharaan ternak sapi ini.”[[76]](#footnote-76)

Hal ini Selaras juga seperti yang telah diutarakan oleh pak Jhon sebagai pemilik dari ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Batas waktu kerjasama pemeliharaan ternak sapi ini sampai pemelihara tidak ingin lagi melakukan kerjasama yang dilakukan ini.”[[77]](#footnote-77)

Berdasarkan hasil yang telah penulis dapat dari wawancara bersama pemilik dan pemelihara sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bahwa batas waktu pemeliharaan ini berdasarkan kesanggupan dari pemelihara sapi ini. Jika pemelihara tidak ingin lagi melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ini maka sampai itulah kerjasama itu berlangsung.

1. Sistem Pembagian Keuntungan

Pada pembahasan pembagian keuntungan dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Senali ini, hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan pemelihara dan pemilik ternak sapi di Desa Senali ini yaitu seperti yang telah diutarakan oleh pak Kasbi sebagai pemelihara hewan ternak sapi bahwa:

“Adapun sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dari kerjasama yang saya dan pemilik sapi lakukan ini ada dua macam sistem pembagian. Sistem yang pertama yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak sapi yang dipelihara oleh pihak pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak pemelihara itu melahirkan maka anak sapi yang pertama diberikan terlebih dahulu kepada pemelihara sapi dan ketika sapi melahirkan anak kedua maka anak sapi yang kedua diberikan pada pemilik sapi. maka dari anak sapi itu dibagi dua, satu untuk pemilik ternak sapi dan satu untuk pemelihara ternak sapi dan seterusnya seperti itu. Sistem pembagian keuntungan yang ke dua yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua.”[[78]](#footnote-78)

Sama halnya seperti yang diutarakan oleh pak Sahrul sebagai pemelihara ternak sapi yang berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, pak Sahrul mengutarakan bahwa:

“Adapun sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dari kerjasama yang saya dan pemilik sapi lakukan ini ada dua macam sistem pembagian. Sistem yang pertama yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak sapi yang dipelihara oleh pihak pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak pemelihara itu melahirkan maka anak sapi yang pertama diberikan terlebih dahulu kepada pemelihara sapi dan ketika sapi melahirkan anak kedua maka anak sapi yang kedua diberikan pada pemilik sapi. maka dari anak sapi itu dibagi dua, satu untuk pemilik ternak sapi dan satu untuk pemelihara ternak sapi dan seterusnya seperti itu. Sistem pembagian keuntungan yang ke dua yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua.”[[79]](#footnote-79)

Serupa juga seperti apa yang diutarakan oleh pak Sugiantono selaku pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Adapun sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dari kerjasama yang saya dan pemilik sapi lakukan ini ada dua macam sistem pembagian. Sistem yang pertama yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak sapi yang dipelihara oleh pihak pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak pemelihara itu melahirkan maka anak sapi yang pertama diberikan terlebih dahulu kepada pemelihara sapi dan ketika sapi melahirkan anak kedua maka anak sapi yang kedua diberikan pada pemilik sapi. maka dari anak sapi itu dibagi dua, satu untuk pemilik ternak sapi dan satu untuk pemelihara ternak sapi dan seterusnya seperti itu. Sistem pembagian keuntungan yang ke dua yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua.”[[80]](#footnote-80)

Selaras juga seperti yang diutarakan oleh pak Ramin sebagai pemelihara ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“Sistem pembagian keuntungan yang saya dan pemilik sapi gunakan itu ada dua macam sistem pembagian. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi. Sistem pembagian yang kedua yaitu pembagian keuntungan dengan cara menjual sapi yang dipelihara, lalu dilakukannya pengembalian modal yang digunakan pemilik sapi untuk membeli sapi itu terlebih dahulu. Setelah pengembalian barulah pembagian keuntungan, 50% untu pemilik sapi dan 50% untuk saya yang dibagi dari sisa uang pengembalian modal yang telah dilakukan tadi”.[[81]](#footnote-81)

Hal ini Selaras juga seperti yang telah diutarakan oleh pak Jhon sebagai pemilik dari ternak sapi, ia mengutarakan bahwa:

“kerjasama yang saya dan pemelihara lakukan ini memiliki dua sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara pembagian anak dari induk sapi yang telah melahirkan. Sistem pembagian yang kedua yaitu pembagian keuntungan dari hasil penjualan sapi yang dipelihara oleh si pemelihara, dengan mengembalikan modal saya membeli sapi itu terlebih dahulu dan sisanya itulah yang menjadi keuntungan kami dan itu dibagi dua”.[[82]](#footnote-82)

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama pemilik sapi dan pemelihara sapi bahwasanya pembagian keuntungan pada kerjasama yang mereka lakukan itu ada dua sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Sistem yang kedua yaitu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengembalian modal.

1. **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara**

Rata-rata kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi menggunakan sistem bagi hasil ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia dalam melakukan kerjasama baik dalam pemeliharaan hewan ternak sapi ataupun kerjasama yang lainnya. Adapun salah satu contoh daerah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam melakukan kerjasama yaitu di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk menambah pendapatan agar tecukupinya kebutuhan warga Desa Senali banyak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik dan pemelihara sapi bahwa sebelum pemilik dan pemelihara melakukan kerjasama mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu. Adapun yang dibahas pada perjanjian itu adalah tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang ingin dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan ternak sapi.

Adapun hasil yang didapat oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa sistem yang digunakan oleh pemilik dan pemelihara sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini yaitu menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan yang telah didapatkan dari kerjasama yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dalam kerjasama yang dilakukan itu mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan)dan *dharar* (bahaya)*.*

Dalam kerjasama itu mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena tidak adanya penjelasan secara jelas pada saat akad tentang modal yang digunakan apakah semuanya ditanggung oleh pemilik atau ada modal yang ditanggung oleh pemelihara juga.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB VIII Pasal 235 ayat 3 menjelaskan bahwa: “Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti”.[[83]](#footnote-83)

Dan telah dijelaskan juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Qs.Al-Baqarah: 282)*

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah untuk menuliskannya apabila bermuamalah tidak secara tunai, dan penulis harus bersikap adil dan benar, tidak boleh berpihak pada salah satu dari orang yang melakukan perjanjian dan tidak boleh menuliskan selain apa yang telah diperjanjikan.[[84]](#footnote-84)

Dalam kerjasama ini juga mengandung unsur *dharar* (bahaya) karena pada saat terjadinya kerugian tidak adanya tanggung jawab dari pemilik untuk memberikan hasil jerih payah si pemelihara yang telah memelihara sapinya dan tidak adanya penggantian kerugian pemelihara dalam mengeluarkan modal untuk mengurus perihal dalam pengembangbiakan ternak sapi.

Dalam hal ini pemelihara mengalami kerugian lebih jika sapi yang dipelihara itu mati, karena tidak adanya upah yang diberikan oleh pemilik sapi atas jerih payah si pemelihara dalam memelihara sapi dan tidak adanya penggantian modal yang dikeluarkan oleh pemelihara untuk mengurus pengembangiakan sapi seperti biaya di perjalanan dan modal pembelian sperma untuk disuntikkan ke sapi betina supaya sapi betina hamil agar sapi tersebut dapat memhasilkan keuntungan.

Dan telah dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ketentuan umum pada Pasal 247 menjelaskan bahwa: “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal”.[[85]](#footnote-85)*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan pada BAB VIII Pasal 237 menjelaskan bahwa: “Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal”.[[86]](#footnote-86)

Maka dari itu, berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini tidak sah dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena mengandung unsur *gharar* (Ketidakjelasan) pada modal yang akan digunakan untuk melakukan kerjasama, karena pada akad tidak dijelaskan apakah modal yang ditanggung oleh pemilik sapi semua modal atau tidak. Kerjasama ini juga mengandung unsur *dharar* (Bahaya) karena pemelihara akan mengalami kerugian lebih jika sapi yang dipelihata mati.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara jika memperoleh keuntungan maka sistem pembagian keuntungannya ada dua, sistem pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Kedua yaitu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengembalian modal. Namun pada kerjasama ini terdapat ketidakjelasan dalam penetapan modal. Jika mengalami kerugian atau sapi yang dipelihara mati bukan akibat kelalaian si pemelihara, pemilik ternak sapi tidak ada pertanggung jawaban atau tidak adanya pemberian upah dari pemilik ternak sapi atas jerih payah si pemelihara sapi, selain itu, tidak ada juga pengembalian modal dari pemilik sapi atas modal yang telah dikeluarkan oleh si pemelihara dalam pemberian makan sapi setiap harinya, dan tidak ada pula pengembalian biaya perjalanan si pemelihara sapi dalam mengurus masalah pengembangbiakan sapi ataupun mencari pembeli sapi ketika sapi ingin dijual. Dengan demikian pemelihara mengalami kerugian lebih besar dari pada pemilik ternak sapi.
3. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ini dalam hal pembagian keuntungan sudah sesuai dengan bentuk musyarakah. Tapi dalam hal terjadi kerugian, mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena tidak adanya kejelasan tentang modal dan mengandung unsur *dharar* (bahaya) yang merugikan pemelihara sapi karena tidak adanya pemberian upah atas jerih payah dari si pemelihara dan tidak adanya pengembalian modal dari pemilik sapi atas modal yang telah dikeluarkan oleh si pemelihara sapi. Maka dari itu kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Senali ini tidaklah sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
4. **Saran**

Adapun saran yang perlu dan patut penulis berikan sebagai penyususn skripsi ini, penulis ingin memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

1. Kepada pemilik ternak sapi seharusnya modal semuanya itu ditanggung oleh pemilik sapi, mulai dari modal pembelian sapi, biaya perjalanan, dan semua urusan yang mengeluarkan modal untuk mengurus sapi maka itu seharusnya ditanggung oleh pemilik sapi. Adapun masalah kerugian yang dialami, seharusnya pemilik memberikan upah atas jerih payah si pemelihara yang telah memelihara dan mengurus ternak sapi itu. Dan perjanjian yang dilakukan seharusnya ditulis dengan bertanda tangan di atas materai.
2. Kepada pemelihara sapi seharusnya lebih bertanggung jawab lagi dalam mengurus ternak sapi agar sapi tidak sakit agar tidak mati dan tidak mengalami kerugian. Dan perjanjian yang dilakukan seharusnya ditulis dengan bertanda tangan di atas materai.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

‘Azam, Muhammad, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah,* Kairo: Ar-Risalah Dauliyah, 2001.

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3,* Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Aditio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Djuwaini, Dimyauddi, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Faisal, Sanapiah, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi,* Bandung: Mandar Maju, 2013.

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Kasiram, *Metode Penelitian,* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Katsir, Ibn, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I,* Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2009.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Mufid, Moh, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah,* Makassar: Zahra Litera Makassar, 2017.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah,* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populeh Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah,* Jakarta: Mizan Media Utama, 2011.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-3, Depok: Kencana, 2017.

Qhazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Kencana, 2012.

Rivai, Viethzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi,*  Ed 2 Cet 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudirman, Ahmad, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh,* Jakarta: Anglo Media, 2004.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait,* Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

1. **Artikel dan Jurnal**

Andiko, Toha, “Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern”*, Jurnal Ilmiah Mizani,* Vol. 4 No. 1, 2017.

Darmawati, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi”, *Sulesana,* Vol. 12, No. 2, 2018.

Hosen, Nadratuzzaman, “Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi”, *Al-Iqtishad,* Vol. 1, No. 1, 2009.

Nizwar Anas, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Mudharabah di BMT L-Risma Kota Bengkulu*" (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2017).

Rahman, Fudhail, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i,* Vol. 5, No. 3, 2018.

Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id al-Fiqhiyah”, *Human Falah,* Vol. 1, No. 1, 2014**.**

Tresni Pertiwi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)"* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2018) .

Yayuk Yupita, "*Praktek Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Pemerintah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tungkal 2 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)"* (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2018).

1. Dimyauddi Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 224 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Rahman Qhazaly, *Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana,2012), h. 15* [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 155 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*…, h. 55 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani,2013), h.388 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dimyauddi Djuwaini, *Pengantar Fiqh…,* h. 224 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 12 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-3, (Depok: Kencana, 2017), h. 71 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…,* h. 75 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kasbi, Wawancara, 14 Juli 2020 pukul 13.38 Wib [↑](#footnote-ref-10)
11. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…*, h. 71-76 [↑](#footnote-ref-11)
12. Nizwar Anas, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Mudharabah di BMT Risma Kota Bengkulu,* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2017) [↑](#footnote-ref-12)
13. Yayuk Yupita, *Praktek Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Pemerintah Prespektif Hukum Isalam (Studi Kasus di Desa Tungkal 2 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan), (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu, Bengkulu, 2018)*  [↑](#footnote-ref-13)
14. Tresni Pertiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang), (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018)* [↑](#footnote-ref-14)
15. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7 [↑](#footnote-ref-15)
16. Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kasiram, *Metode Penelitian,* (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 25 [↑](#footnote-ref-19)
20. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 176 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 59 [↑](#footnote-ref-21)
22. Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 26 [↑](#footnote-ref-23)
24. Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi,*  Ed 2 Cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 799-800 [↑](#footnote-ref-24)
25. Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populeh Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah,* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2011), h. 31 [↑](#footnote-ref-25)
26. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 223 [↑](#footnote-ref-26)
27. Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004), h. 32 [↑](#footnote-ref-27)
28. Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah,* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 93-95 [↑](#footnote-ref-28)
29. Panji Adam, *Fikih Muamalah…,* h. 96 [↑](#footnote-ref-29)
30. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…,* h. 71 [↑](#footnote-ref-30)
31. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…,* h. 72-76 [↑](#footnote-ref-31)
32. Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern"*, Mizani,* Vol. 4 No. 1, 2017, h. 10 [↑](#footnote-ref-32)
33. Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi,* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 18-19 [↑](#footnote-ref-33)
34. Moh Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah,* (Makassar: Zahra Litera Makassar, 2017), h. 22 [↑](#footnote-ref-34)
35. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015), h. 18-19 [↑](#footnote-ref-35)
36. Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h.69-71 [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 307-308 [↑](#footnote-ref-37)
38. Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah…,* h. 74-76. [↑](#footnote-ref-38)
39. M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 159 [↑](#footnote-ref-39)
40. Nadratuzzaman Hosen, "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi", *Al-Iqtishad,* Vol. 1 No. 1, Januari 2009, h. 54-55 [↑](#footnote-ref-40)
41. M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi…,* h. 161 [↑](#footnote-ref-41)
42. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I,* Vol. 5, No. 3, 2018, h. 257 [↑](#footnote-ref-42)
43. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan…, h. 268 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Anglo Media, 2004), h. 125 [↑](#footnote-ref-44)
45. Muhammad 'Azam, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* (Kairo: ar-Risalah Dauliyah, 2001), h. 9 [↑](#footnote-ref-45)
46. Sugianto, "Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id al-Fiqhiyah", *Human Falah,* Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014, h. 5 [↑](#footnote-ref-46)
47. Nasrul, Wawancara, Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nasrul, Wawancara, Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-48)
49. Nasrul, Wawancara, Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-49)
50. Nasrul, Wawancara, Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-50)
51. Deah, Wawancara, Sekretaris Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-51)
52. Deah, Wawancara, Sekretaris Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-52)
53. Deah, Wawancara, Sekretaris Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-53)
54. Nasrul, Wawancara, Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-54)
55. Nasrul, Wawancara, Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2020 [↑](#footnote-ref-55)
56. Kasbi, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 28 November 2020 [↑](#footnote-ref-56)
57. Sahrul, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-57)
58. Sugiantono, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ramin, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 30 November 2020 [↑](#footnote-ref-59)
60. Jhon, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 01 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-60)
61. Kasbi, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 28 November 2020 [↑](#footnote-ref-61)
62. Sahrul, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-62)
63. Sugiantono, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-63)
64. Ramin, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 30 November 2020 [↑](#footnote-ref-64)
65. Jhon, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 01 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-65)
66. Kasbi, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 28 November 2020 [↑](#footnote-ref-66)
67. Sahrul, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-67)
68. Sugiantono, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-68)
69. Ramin, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 30 November 2020 [↑](#footnote-ref-69)
70. Jhon, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 01 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-70)
71. Guswanperi, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 04 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-71)
72. Rasul, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 06 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-72)
73. Kasbi, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 28 November 2020 [↑](#footnote-ref-73)
74. Sahrul, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-74)
75. Sugiantono, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ramin, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 30 November 2020 [↑](#footnote-ref-76)
77. Jhon, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 01 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-77)
78. Kasbi, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 28 November 2020 [↑](#footnote-ref-78)
79. Sahrul, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-79)
80. Sugiantono, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 29 November 2020 [↑](#footnote-ref-80)
81. Ramin, Wawancara, Pemelihara Sapi, Pada Tanggal 30 November 2020 [↑](#footnote-ref-81)
82. Jhon, Wawancara, Pemilik Sapi, Pada Tanggal 01 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-82)
83. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…*, h. 72 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I,* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2009), h. 562-564 [↑](#footnote-ref-84)
85. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…*, h. 75 [↑](#footnote-ref-85)
86. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum…*, h. 72 [↑](#footnote-ref-86)